

ABSTRAK

Dasar dari adanya pemindahan ibu kota negara ini adalah Jakarta yang dianggap sudah tidak mampu lagi menanggung beratnya beban ekologis sebagai ibu kota. Persoalan ekologis yang terjadi setiap tahunnya terjadi di Jakarta seperti banjir, polusi udara, dan kemacetan sangat berdampak pada produktivitas pemerintahan. Selain itu, Jakarta juga dianggap memiliki sejumlah masalah ekologis yang akut seperti menurunnya cadangan air baku, semakin rendahnya permukaan air tanah, dan adanya ancaman bencana alam berupa gempa bumi. Dari sisi pertimbangan ekonomi, pemindahan Ibu Kota Nusantara juga merupakan upaya pemerintah untuk mempersempit kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa dan luar Pulau Jawa, atau Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur pemerintahan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun mekanisme pengadaan tanah yang digunakan adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya dapat melalui hibah, jual-beli, atau cara lain yang disepakati. Sejauh ini perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap tanah milik warga masyarakat yang terdampak yaitu melalui proses penggantian kerugian, ganti kerugian yang diberikan pemerintah berupa uang saja dan belum ada selain uang. Pemerintah juga menerapkan kebijakan land freezing di Kawasan Ibu Kota Nusantara untuk mengontrol keberjalanan pembangunan dan untuk mencegah potensi terjadinya spekulasi tanah. Mekanisme pengadaan tanah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dilakukan dengan cara jual beli antara pemerintah dengan masyarakat terdampak. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya ganti kerugian kepada masyarakat terdampak yang berupa penggantian uang, yang masyarakat dapat katakan sebagai ganti untung karena harganya bisa beberapa kali lipat dari harga yang sebelumnya mereka beli.

Kata Kunci : *Ibu Kota Nusantara, Pengadaan Tanah, Land Freezing*

.ABSTRACT

The basis for the relocation of the country's capital city is Jakarta, which is considered no longer able to bear the heavy ecological burden of being the capital city. Ecological problems that occur every year in Jakarta such as flooding, air pollution, and congestion have a huge impact on government productivity. In addition, Jakarta is also considered to have a number of acute ecological problems such as the decline in raw water reserves, the lowering of groundwater levels, and the threat of natural disasters in the form of earthquakes. In terms of economic considerations, the relocation of the capital city is also an effort by the government to narrow the gap in economic growth that occurs in Java and outside Java, or western Indonesia and eastern Indonesia government. The approach method in this research is an empirical juridical approach. The land acquisition mechanism used is land acquisition for development in the public interest, the implementation of which can be through grants, buying and selling, or other agreed methods. So far, the protection provided by the government for the land owned by affected community members is through the compensation process, the compensation provided by the government is in the form of money only and there is no other than money. The government also implements a land freezing policy in the Nusantara Capital Region to control the course of development and to prevent the potential for land speculators. The land acquisition process in the development of the Nusantara Capital is carried out by buying and selling between the government and the affected communities. Protection carried out by the government can be seen from the existence of compensation to affected communities in the form of monetary compensation, which the community can say is compensation for profit because the price can be several times the price they previously bought.

Keywords: Capital of the Archipelago, Land Acquisition, Land Freezing